



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan akuntansi di instansi-instansi pemerintah sudah menjadi keharusan dan tuntutan jaman seiring dengan tuntutan reformasi. Dalam konteks yang lebih luas pemerintah dituntut mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*). Terwujudnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas merupakan wujud dari pemerintahan yang baik. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja kepada publik.

Pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Menurut Jumaning (2006:239) pengukuran Kinerja Keuangan memiliki dua tujuan. Pertama pengukuran Kinerja Keuangan digunakan untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan, kedua untuk mengetahui kemampuan dalam mendayagunakan semua aset. Sehingga untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan perlu dilakukan kinerja keuangan, pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah baik dalam pengelolaan keuangan maupun dalam mendayagunakan semua aset daerah yang dimiliki. Hal ini perlu dibuktikan dari seberapa efektif, efisien dan ekonomis uang publik yang dibelanjakan. Efisien yang berarti pendayagunaan sumber daya untuk menghasilkan output yang maksimal, efektifitas berarti penggunaan sumber daya berhasil mencapai tujuan dan sasaran, serta ekonomis yang berarti hemat dan cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya Mahmudi (2015:83).

Menilai Kinerja Keuangan pemerintah daerah salah satunya dapat dilakukan dengan melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran. Menurut lampiran II.03 PSAP 02, Laporan realisasi anggaran memperlihatkan indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang meliputi, apakah telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan ekonomis, apakah telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD) serta telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. Sehingga dengan mengetahui sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi pada komponen dalam Laporan Realisasi Anggaran khususnya pendapatan dan belanja, dapat dilakukan evaluasi kinerja pemerintah dalam hal efesiensi dan efektifitas, serta dapat diketahui kesesuaian pelaksanaan penggunaan anggarannya.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor bertugas membantu Bupati menyelenggarakan kewenangan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengelolaan seluruh keuangan dan aset daerah Kota Bogor, maka dari itu sejalan dengan tujuan dari pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002) sistem pengukuran kinerja ini dapat dijadikan

sebagai alat pengendalian sektor publik, membantu memperbaiki kinerja pemerintah agar berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja dalam memberikan layanan kepada masyarakat sehingga dengan pengukuran kinerja menjadi salah satu upaya dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (BPKP 2000).

Menurut data yang terdapat pada CALK bab III mengenai ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor selama Tahun Anggaran 2018 menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bogor yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk Pendapatan Daerah Kota Bogor hanya mencapai Rp2.328.703.432.668,85 atau mencapai 99,96% dari target semula yang ditetapkan sebesar Rp2.329.692.104.183. Pada sisi lain, Realisasi Belanja dan transfer mencapai Rp2.406.904.426.030,04 atau hanya 90,78% dari anggaran yang ditetapkan semula sebesar Rp2.651.280.650.160,71 sehingga berdasarkan selisih pendapatan dan belanja terdapat defisit sebesar Rp78.200.993.361,19. Pada sisi pendapatan menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih mendominasi penerimaan Daerah dibandingkan dengan PAD. Hal ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah Kota Bogor terhadap Pemerintah Pusat. Hal lainnya berkaitan dengan anggaran belanja, dimana kegiatan yang seharusnya terealisasi ditahun yang bersangkutan ternyata masih ada beberapa program yang tidak terealisasi, terlihat dari realisasi yang jauh dari target yang diharapkan. Sehingga dari data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih belum efektif dalam menggunakan pendapatannya serta penyerapan belanjanya pun belum maksimal.

Selain membantu mengelola keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran, salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan BKAD yaitu menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang hasilnya akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dari paparan tersebut penulis tertarik untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Kota Bogor khususnya dalam hal Pendapatan dan Belanja serta kesesuaian penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang berpedoman pada PSAP 02.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kinerja Pendapatan Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor
2. Bagaimana Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor?
3. Bagaimana kesesuaian penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor terhadap PSAP 02 tahun 2010



1.3 Tujuan

Tujuan menganalisis kinerja Pendapatan, Belanja, dan Kesesuaian Laporan Realisasi Anggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah :

1. Menguraikan kinerja pendapatan
2. Mengetahui kinerja belanja
3. Mengetahui kesesuaian penyajian laporan Realisasi Anggaran dengan PSAP 02

1.4 Manfaat

Manfaat Analisis kinerja Pendapatan, Belanja dan Kesesuaian penyajian Laporan Realisasi Anggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah :

- 1) Bagi Akademis
Menambah informasi yang bermanfaat bagi pembaca dan bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji pada bidang kajian yang sama, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya.
- 2) Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada khususnya yang berkaitan dengan kinerja pendapatan, belanja dan kesesuaian penyajian laporan realisasi anggaran pemerintah daerah dan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi BKAD.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akutansi Pemerintah

Menurut Kieso, et al (2014) dalam Martani (2016:4) Mendefinisikan “akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data/infomasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas.

Menurut Nordiawan (2006:35) akuntansi sektor publik adalah “Proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan”. Akuntansi pemerintah merupakan jenis akuntansi yang hanya di lakukan di dalam instansi pemerintah, baik pemerintahan pusat maupun daerah. Mardiasmo (2006:01) mengatakan bahwa ruang lingkup akuntansi pemerintahan adalah mencakup akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan